



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan

Selingkar wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 38



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2021

DAFTAR PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Maupun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, akan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Bidang Pendidikan yang berkembang di masyarakat dapat merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dalam mewujudkan sumber daya yang mandiri, berdaya saing yang tinggi perlu didukung oleh iklim yang kondusif melalui partisipasi beretos kerja dan berdayaguna kepada semua pihak. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari kualitas pendidikan dan kualitas kebugaran serta kesehatan baik dari anak didik maupun dari tenaga pendidik dan kependidikan.

Berpedoman dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022 dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Dikpora dan Tujuan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Magetan, secara spesifik akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang - bidang yang menjadi kompetensi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Magetan. Dengan penetapan rencana ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pendidikan. Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Renja ini menjadi pedoman dan acuan bagi semua tingkatan pengelola bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magetan dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 1

(satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Secara kontekstual, renja memuat visi, misi, nilai-nilai dan faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Maka dari itu, guna mencapai hasil pembangunan pendidikan yang terarah dan tepat sasaran, diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan di bidang pendidikan, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2022. Selanjutnya Rancangan awal Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2022 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan awal penyusunan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2022, diantaranya adalah :

- 1) 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor);
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Seri E);
 - 21) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor Seri E);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
 - 25) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2. Landasan Hukum berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional maupun lokal.
- 1.3. Maksud dan tujuan berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun

2021, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja Kunci (IKK)
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya.
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD, membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memberikan informasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu. Juga dicantumkan tanggal, nama kepala Perangkat Daerah dan stempel

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian realisasi program dan kegiatan hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Tahun 2020 dan perkiraan target capaian untuk tahun 2021 sekaligus dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel Evaluasi Hasil Monitoring Kinerja OPD 2020, berikut ini sebagaimana terlampir :

Tabel 2.1
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan

NO	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100								
	2	3	4	K		K		K		K		K		K		K		K		16	17
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp		
	-3	-4	-5	-17				7												-19	-20
1	1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Angka	95	Angka	95	Angka	85	Angka	-	Angka	95	Angka	112	100	191	112	201	34	PENDIDI KAN,	
	1.1.1.1	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	PAUD/TK yang memiliki sarana	25	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	99	3	100	13	65	PENDIDI KAN,	V
	1.1.1.2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD yang menerima dana insentif Orang	5600	Orang	4.460	Orang	1.120	Orang	-	Orang	1.120	Orang	100	100	5.580	100	100	31	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.1.3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan APE PAUD/TK Unit	1180	Unit	180	Unit	100	Unit	103	Unit	103	Unit	103	99	283	103	26	17	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.1.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD Lembaga	978	Lembaga	1.366	Lembaga	978	Lembaga	704	Lembaga	704	Lembaga	72	100	2.070	72	42	75	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.1.5	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Kali	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	100	2	100	40	44	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
2	1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD /APM SD;APK SMP;APM SMP Angka;Angka;Angka;	100,00;99,43;100,00;92,25	Angka;Angka;Angka;	107,96;99,33;124,50;9	Angka;Angka;Angka;	100,00;99,37;100,00;92,12	Angka;Angka;Angka;	105,83;99,43;110,66;110,66;	Angka;Angka;Angka;	105,83;99,43;110,66;93,91	Angka;Angka;Angka;	#VALUE!	96	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	600	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	
	1.1.2.1	penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren	Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP Lembaga	539	Lembaga	288	Lembaga	539	Lembaga	459	Lembaga	459	Lembaga	85	100	747	85	28	29	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.2	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi Kegiatan	11	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	150	55	5	150	50	18	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.3	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi Unit	625	Unit	125	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	100	100	135	100	26	299	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.4	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi Kegiatan	10	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	#DIV/0!	2	-	20	5	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.5	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	jumlah sekolah yang terakreditasi Lembaga	455	Lembaga	80	Lembaga	100	Lembaga	100	Lembaga	100	Lembaga	100	86	180	100	36	21	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Unit	495	Unit	-	Unit	4	Unit	10	Unit	10	Unit	-	-	10	-	8	28	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.7	Pekan seni pelajar	jumlah peserta pekan seni pelajar Orang	60000	Orang	12.000	Orang	12.000	Orang	-	Orang	-	Orang	-	#DIV/0!	12.000	-	20	11	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.8	Pengembangan Pendidikan Inklusif	jumlah sekolah penyelenggaraan program pendidikan inklusif Lembaga	403	Lembaga	60	Lembaga	80	Lembaga	60	Lembaga	80	Lembaga	100	100	140	100	35	22	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V
	1.1.2.9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS Lembaga	539	Lembaga	539	Lembaga	539	Lembaga	459	Lembaga	459	Lembaga	85	99	998	85	37	#DIV/0!	PENDIDI KAN, KEPEMUDAAN DAN DINAS	V

NO	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100				16	17
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp				
	1.1.2.10	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dibangun Unit	9	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	99	2	100	22	21	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.2.11	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	prosentase jumlah dana pendamping DAK %	25	%	96	%	100	%	44	%	97	%	97	97	193	97	3.867	#DIV/0!	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.2.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa Paket	17	Paket	15	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	98	16	100	114	171	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	1.1.2.13	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	jumlah UKS yang dibina Lembaga	625	Lembaga	111	Lembaga	125	Lembaga	125	Lembaga	125	Lembaga	100	100	236	100	38	25	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.2.14	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	jumlah siswa SD yang ikut Ujian Siswa	33000	Siswa	7.143	Siswa	6.600	Siswa	-	Siswa	6.600	Siswa	100	81	13.743	100	42	33	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.2.15	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional Siswa	38000	Siswa	6.326	Siswa	7.600	Siswa	-	Siswa	7.600	Siswa	100	97	13.926	100	37	35	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.2.16	manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di	Jumlah lembaga yang dinilai Lembaga	2625	Lembaga	532	Lembaga	525	Lembaga	525	Lembaga	525	Lembaga	100	100	1.057	100	40	27	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
		Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik Lembaga		Lembaga		Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100	99	1	100	#DIV/0!	#DIV/0!	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
		Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik Lembaga		Lembaga		Lembaga	300	Lembaga		Lembaga	491	Lembaga	164	91	491	164	#DIV/0!	#DIV/0!	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DID Tambahan)	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi Unit		Unit		Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100	99	9	100	#DIV/0!	#DIV/0!	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
		Biaya Pendamping Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah DID-T (DAU)	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		%		%	100	%	97	%	97	%	97	97	97	97	#DIV/0!	#DIV/0!	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
3	1.1.3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 %	100	%	99	%	97	%	-	%	97	%	100	98	196	100	196	39	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN			
	1.1.3.1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	jumlah pejabat yang dinilai Orang	3900	Orang	780	Orang	800	Orang	-	Orang	487	Orang	61	100	1.267	61	32	32	PENDIDI KAN, DINAS PENDIDI KAN,	V		
	1.1.3.2	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru peserta pelatihan Orang	1760	Orang	111	Orang	350	Orang	-	Orang	-	Orang	-	#DIV/0!	111	-	6	19	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	1.1.3.3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah kepala sekolah yang di nilai Orang	502	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	-	-	-	-	-	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
	1.1.3.4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah data kependidikan yang disusun Dokumen	4	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	#DIV/0!	-	-	-	-	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		
5	3.1.1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan pembinaan cabang olahraga %	85	%	77	%	82	%	32	%	70	%	85	61	147	85	173	30	PENDIDI KAN, KEPEMU			
	3.1.1.1	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kelompok olahraga yang dibina Kelompok	5	Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	#DIV/0!	1	-	20	18	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	3.1.1.2	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kali	5	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	96	2	100	40	34	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		

NO	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7				11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100			
				K		K		K				K		K		K		K		K			
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan		
	3.1.1.3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	cabang olahraga yang di selenggarakan Kali	35	Kali	7	Kali	7	Kali	7	Kali	7	Kali	100	37	14	100	40	30	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	3.1.1.4	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	olahraga yang dilakukan pendampingan	5	Cabor	1	Cabor	1	Cabor	-	Cabor	-	Cabor	-	-	1	-	20	19	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	3.1.1.5	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina Cabor	65	Cabor	52	Cabor	13	Cabor	13	Cabor	13	Cabor	100	89	65	100	100	31	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
6	3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	prasarana olahraga yang layak dan baik %	75	%	65	%	65	%	42	%	65	%	100	89	130	100	173	65	PENDIDI KAN, KEPEMU			
	3.1.2.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	prasarana olah raga yang dibangun Unit	3	Unit	1	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100	97	4	100	80	80	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	3.1.2.2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	prasarana olah raga yang dipelihara Unit	15	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	87	4	100	27	52	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
7	4.1.1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan organisasi pemuda %	76,55	%	72	%	73	%	4	%	70	%	97	72	142	97	185	31	PENDIDI KAN, KEPEMU			
	4.1.1.1	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan seleksi paskibraka Kegiatan	10	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	50	72	3	50	30	31	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	4.1.1.2	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor Kegiatan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	83	2	100	40	30	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
8	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Angka	82,25	Angka	77	Angka	78	Angka	79,61	Angka	79,61	Angka	102	85	157	102	191	23	PENDIDI KAN, KEPEMU			
	1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi kantor Tahun	5	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	83	2	100	40	23	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar	100	%	60	%	100	%	47	%	100	%	100	100	160	100	160	23	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Angka	85	Angka	77	Angka	78	Angka	79,61	Angka	80	Angka	102	97	157	102	185	39	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
10	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang layak fungsi %	85	%	85	%	85	%	85	%	85	%	100	99	170	100	200	64	PENDIDI KAN, KEPEMU			
	2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Unit	80	Unit	7	Unit	16	Unit	6	Unit	15	Unit	94	100	22	94	28	32	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	2.1.2.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Paket	115	Paket	20	Paket	20	Paket	-	Paket	5	Paket	25	100	25	25	22	32	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	2.1.2.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhabilitasi Unit	17	Unit	3	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	99	5	100	33	53	PENDIDI KAN, KEPEMU	V		
	2.1.2.4	Pengadaan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket	115	Paket	16	Paket	30	Paket	10	Paket	10	Paket	33	99	26	33	21	106	PENDIDI KAN, KEPEMU DAAN	V		

NO	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100			
				Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	K	Rp	K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp		
11	3.1.3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu %	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	200	100	200	35	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.1.3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	perencanaan dan pelaporan yang disusun Laporan	28	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	2	Laporan	7	Laporan	117	100	13	117	46	39	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	V
	3.1.3.2	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lembaga yang didata asetnya Lembaga	2625	Lembaga	525	Lembaga	525	Lembaga	494	Lembaga	494	Lembaga	94	100	1.019	94	39	32	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	V
12	4.1.4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase ketersediaan data kependidikan %	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	99	200	100	200	37	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	
	4.1.4.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	profil pendidikan yang disusun;Jumlah peserta try out paket A, B dan C	5,00;460,00	Dokumen;Orang	1;460	Dokumen;Orang	1,00;460,00	Dokumen;Orang	1,00;460,00	Dokumen;Orang	1,00;460,00	Dokumen;Orang	100	100	#VALUE!	100	#VALUE!	30	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	V
		Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan Pendidikan Bulan		Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	92	24	100	40	28	PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	V
	4.1.4.2	monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah lembaga untuk biaya umum	60	Lembaga		Lembaga	284	Lembaga	-	Lembaga	288	Lembaga	101	100	288	101	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN	V

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Dikpora Tahun 2013 – 2018. Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga pada realisasinya sebagian besar telah mencapai capaiannya. Diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B, Angka Kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan beberapa indikator lain, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			55,68	97.5	97,75	97,25	95.38	97,79	98,25	
2	APK SD / MI / Paket A			111,62	100	100	100,00	107.96	105,83	100	
3	APK SMP / MTs / Paket B			101,37	100	100	100,00	124.50	110,66	100	
4	APM SD / MI			100	99.33	99,35	99,31	99.33	99,43	99,37	
5	APM SMP / MTs			95	93.30	93,35	93,25	93.90	93,91	93,4	
6	Angka partisipasi sekolah SD / MI			-	100	100		100	111,15	100	
7	Angka partisipasi sekolah SMP / MTs			-	100	100		100	102,02	100	
8	Angka putus sekolah SD / MI			0,02	0.010	0,01	0,01	0.004	0	0,01	
9	Angka putus sekolah SMP / MTs			0,03	0.020	0,02	0,02	0.07	0,05	0,02	
10	Angka kelulusan SD / MI			100	100	100	100,00	100	100	100	
11	Angka kelulusan SMP / MTs			100	100	100	100,00	100	100	100	
12	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs			100	100	100	100,00	122.95	109,71	100	
13	Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik			82,45	86.00	89	83	86.29	90,42	92	
14	Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik			95	96.40	96,6	96,20	100	100	96,8	
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV			100	96.10	96,4	95,82	98.73	97,35	96,8	
16	Prosentase SD / MI berakreditasi A			-	13.45	13,75	13,00	9.35	9,61	14,25	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi			Proyeksi 2021	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020		
17	Prosentase SMP / MTs berakreditasi A			-	86.55	86,25	87	48.35	56,14	85,75	
18	Angka rata-rata lama sekolah			12	8.40	8,45	8,35	7,96	0	8,5	
19	Angka harapan lama sekolah				13.73	13,74	13,72	14	0	13,75	
20	Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)			100	99.93	100	99,83	99.95	100	100	
21	Jumlah atlet berprestasi			-	58.00	61	-	60	122	62	
22	Cakupan pembinaan olahraga				109.00	115	96	92,11	95,45	121	
23	Cakupan pelatih yang bersertifikasi				79.00	81	75	81,15	83,56	83	
24	Cakupan pembinaan atlet muda				99.00	120	78	97,67	98,17	141	
25	Prosentase organisasi pemuda yang aktif				70.55	72,55	66,5	86.03	76,45	74,55	
26	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi				10	11	7	9	9	12	
27	Prosentase wirausaha muda				81.40	83,4	77,4	20.31	81,62	85,4	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas
Kondisi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar utamanya pada jenjang Sekolah Dasar yang masih membutuhkan rehabilitasi karena banyak yang rusak akibat bencana alam, sehingga hal ini sedikit mengganggu proses pembelajaran secara khusus dan dampaknya secara umum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendidikan.
2. Kurangnya Tenaga Pendidik (Guru) PNS Terutama pada jenjang Pendidikan SD dan Pengawas Sekolah Jenjang SD dan SMP. Saat ini jenjang SD masih banyak tenaga honorer untuk mencukupi kekurangannya.
3. Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Perlu membuat sekolah unggulan pada jenjang SMP yakni SMPN 1 Magetan, SMPN 1 Maospati dan SMPN 1 Kawedanan, sehingga memerlukan rehab dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung program tersebut
4. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Kelanjutan Pembangunan Stadion Yosonegoro untuk pembangunan pagar area Stadion masih diperlukan agar siap untuk pemanfaatan olahraganya, serta mewadahi pemuda yang melakukan balap motor liar di wilayah kelurahan selosari dan ringroad Sidorejo untuk membangun sirkuit balap motor.
5. Pembinaan Atlet dan Pelatih belum terstruktur dan berjenjang
Pembinaan Atlet dilaksanakan melalui pembibitan dan pembinaan Atlet berbakat, hal ini masih mengalami kendala pada pelatih yang belum memiliki sertifikasi pelatih sehingga pembinaan Atlet dan Pelatih belum dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

6. Rendahnya prestasi Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah 66,5 % hal ini disebabkan karena baru organisasi-organisasi yang besar yang dapat diberikan pembinaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
PERBANDINGAN RENCANA AWAL RKPd DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN

RENCANA AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,05 Angka	324.376.767.210	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,05 Angka	324.376.767.210
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	260.000.000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	260.000.000
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 laporan	60.000.000	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 laporan	60.000.000
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	200.000.000	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	200.000.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Keuangan	12 Bulan	321.274.417.210	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Keuangan	12 Bulan	321.274.417.210
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	321.254.417.210	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	321.254.417.210
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	20.000.000	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	20.000.000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah	465 lembaga	60.000.000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah	465 lembaga	60.000.000
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	465 lembaga	60.000.000	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	465 lembaga	60.000.000
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	17.000.000	1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	17.000.000
1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	12.000.000	1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	12.000.000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	2 Kali	80.000.000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	2 Kali	80.000.000
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	40.000.000	1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	40.000.000
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	40.000.000	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kali	40.000.000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	530.000.000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	530.000.000
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	35.000.000	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	35.000.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	150.000.000	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	150.000.000
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	35.000.000	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	35.000.000
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	50.000.000	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	50.000.000
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	10.000.000	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	10.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.710.350.000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.710.350.000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	450.000.000	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	450.000.000
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.000.000	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.000.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.245.350.000	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.245.350.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	445.000.000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	445.000.000
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	170.000.000	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	170.000.000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	25.000.000	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	25.000.000
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	250.000.000	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	250.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, jumlah kebutuhan pendidikan non formal	98.75, 100, 99.41, 100, 93.45, 100	63.274.800.000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, jumlah kebutuhan pendidikan non formal	98.75, 100, 99.41, 100, 93.45, 100	63.274.800.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	462 Lembaga	34.480.400.000	1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	462 Lembaga	34.480.400.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	1 unit	240.000.000	1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	1 unit	240.000.000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 unit	450.000.000	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 unit	450.000.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0 lembaga	-	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0 lembaga	-
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2 unit	450.000.000	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2 unit	450.000.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 unit	450.000.000	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 unit	450.000.000
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-	1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1 paket	215.000.000	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1 paket	215.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7100 siswa	450.000.000	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7100 siswa	450.000.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	550.000.000	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	550.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	462 lembaga	560.000.000	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	462 lembaga	560.000.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	30.965.400.000	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	30.965.400.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	150.000.000	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	150.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Lembaga	23.166.800.000	1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Lembaga	23.166.800.000
1.01.02.2.02.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	0 unit	-	1.01.02.2.02.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	0 unit	-
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0 unit	-	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0 unit	-
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 unit	470.000.000	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 unit	470.000.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3 unit	1.380.000.000	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	3 unit	1.380.000.000
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 lembaga	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1 paket	215.000.000	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1 paket	215.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	6500 siswa	350.000.000	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	6500 siswa	350.000.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	700.000.000	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	700.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56 lembaga	170.000.000	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56 lembaga	170.000.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	19.731.800.000	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	19.731.800.000
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	150.000.000	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	150.000.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	704 Lembaga	3.722.600.000	1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	704 Lembaga	3.722.600.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lembaga	-	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lembaga	-
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 unit	380.000.000	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 unit	380.000.000
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lembaga	-	1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lembaga	-
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	704 lembaga	50.000.000	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	704 lembaga	50.000.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	10.806 unit	450.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	10.806 unit	450.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1149 orang	2.767.600.000	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1149 orang	2.767.600.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 kali	50.000.000	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 kali	50.000.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	704 lembaga	25.000.000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	704 lembaga	25.000.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	704 lembaga	-	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	704 lembaga	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	13 Lembaga	1.905.000.000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	13 Lembaga	1.905.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	-	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	-
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2 bulan	1.500.000.000	1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2 bulan	1.500.000.000
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	0	-	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	0	-
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	13 lembaga	225.000.000	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	13 lembaga	225.000.000
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 lembaga	40.000.000	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 lembaga	40.000.000
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 kegiatan	125.000.000	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 kegiatan	125.000.000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 lembaga	15.000.000	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 lembaga	15.000.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	13 lembaga	-	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	13 lembaga	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,60%	6.910.000.000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,60%	6.910.000.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8 Kegiatan	6.910.000.000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8 Kegiatan	6.910.000.000
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/	4 kegiatan	6.200.000.000	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/	4 kegiatan	6.200.000.000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 kegiatan	710.000.000	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 kegiatan	710.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	67,27%	715.000.000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	67,27%	715.000.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	3 Kegiatan	440.000.000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	3 Kegiatan	440.000.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 kegiatan	40.000.000	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 kegiatan	40.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2 kegiatan	400.000.000	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2 kegiatan	400.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	3 lembaga	275.000.000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	3 lembaga	275.000.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3 lembaga	275.000.000	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3 lembaga	275.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan cabang olahraga	96,31%	9.790.000.000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan cabang olahraga	96,31%	9.790.000.000
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	4 unit	4.950.000.000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	4 unit	4.950.000.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4 unit	4.950.000.000	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4 unit	4.950.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten	10 kali	100.000.000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten	10 kali	100.000.000
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 kali	100.000.000	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 kali	100.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	16 cabor	550.000.000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	16 cabor	550.000.000
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	16 cabor	550.000.000	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	16 cabor	550.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12 Bulan	3.900.000.000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12 Bulan	3.900.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 bulan	3.900.000.000	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 bulan	3.900.000.000
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	cabor	-	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	cabor	-
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 Kali	290.000.000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 Kali	290.000.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 kali	290.000.000	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 kali	290.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	726.200.000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	726.200.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12 Bulan	726.200.000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12 Bulan	726.200.000
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	45.200.000	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	45.200.000
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	244.000.000	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	244.000.000
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	12 bulan	437.000.000	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	12 bulan	437.000.000
TOTAL				405.792.767.210	TOTAL				405.792.767.210

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Adapun pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan melalui perencanaan sekala super prioritas dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Dikpora Kabupaten Magetan melalui fasilitas Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magetan, sebagaimana daftar pada tabel berikut:

REKAPITULASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pembangunan Gedung PAUD	Ds. Giripur no, Rt.06 Rw.03	Terpenuhinya sarpras PAUD	828 M ²	Usulan musren Kecamat an

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, arahan Bupati Magetan, serta memperhatikan arah kebijakan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur dan Nasional, juga memperhatikan aspirasi masyarakat akan dituangkan dalam program prioritas dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tergambar dalam Visi Pembangunan Kabupaten Magetan, pelaksanaan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya Pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna), yaitu insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut maka fokus pembangunan pendidikan pada Tahun 2018 – 2023 adalah Penguatan Pelayanan. Hal ini tergambar pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima pendidikan nasional yang dimaksud adalah adalah layanan pendidikan yang (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri

dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Hal ini dikemas dalam Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Adapun Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun 2022 juga memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Magetan, Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan pendayagunaan potensi yang ada.

Tujuan kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Terkait dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Magetan maka sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan memiliki peranan penting dalam melaksanakan Misi 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, dan Terampil).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasar pada RPJMD Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, maka tujuan dan sasaran dari rencana kerja diuraikan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar	Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar	Meningkatkan Rata-rata lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
			Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat	Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat	Mengembangkan kapasitas dan daya saing olahraga
			Meningkatkan kualitas, kreativitas dan daya saing kepemudaan

IKU 2019

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-						
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat			1.1	Indeks pendidikan	72,70 Angka	72,75 Angka	72,80 Angka	72,85 Angka	72,90 Angka
		1.1	Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	1.1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97,500 %	97,750 %	98,250 %	98,750 %	99,250 %
				1.1.2	APK SD / MI / Paket A	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.3	APK SMP / MTs / Paket B	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.4	APM SD / MI	99,330 %	99,350 %	99,370 %	99,410 %	99,430 %
				1.1.5	APM SMP / MTs	93,300 %	93,350 %	93,400 %	93,450 %	93,500 %
				1.1.6	Angka partisipasi sekolah SD / MI	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.7	Angka partisipasi sekolah SMP / MTs	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.8	Angka putus sekolah SD / MI	0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,010 %
				1.1.9	Angka putus sekolah SMP / MTs	0,020 %	0,020 %	0,020 %	0,020 %	0,020 %
				1.1.10	Angka kelulusan SD / MI	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.11	Angka kelulusan SMP / MTs	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.12	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
				1.1.13	Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik	86,000 %	89,000 %	92,000 %	95,000 %	97,000 %
				1.1.14	Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik	96,400 %	96,600 %	96,800 %	97,000 %	97,350 %
				1.1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	96,100 %	96,400 %	96,800 %	97,150 %	97,350 %
				1.1.16	Prosentase SD / MI berakreditasi A	13,450 %	13,750 %	14,250 %	14,750 %	15,550 %
				1.1.17	Prosentase SMP / MTs berakreditasi A	86,550 %	86,250 %	85,750 %	85,250 %	84,450 %
				1.1.18	Angka rata-rata lama sekolah	8,400 Tahun	8,450 Tahun	8,500 Tahun	8,550 Tahun	8,600 Tahun
				1.1.19	Angka harapan lama sekolah	13,730 Tahun	13,740 Tahun	13,750 Tahun	13,760 Tahun	13,770 Tahun
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			2.1	Tingkat pengangguran terbuka	3 %	2,90 %	2,85 %	2,80 %	2,75 %
				2.2	Angka kemiskinan	10,11 Angka	9,91 Angka	9,71 Angka	9,51 Angka	9,31 Angka
		2.1	Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan	2.1.1	Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,930 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %	100,000 %
		3.1	Terwujudnya prestasi olahraga	3.1.1	Jumlah atlet berprestasi	58,000 %	61,000 %	62,000 %	63,000 %	65,000 %
				3.1.2	Cakupan pembinaan olahraga	109,000 %	115,000 %	121,000 %	127,000 %	133,000 %
				3.1.3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	79,000 %	81,000 %	83,000 %	85,000 %	87,000 %
				3.1.4	Cakupan pembinaan atlet muda	99,000 %	120,000 %	141,000 %	162,000 %	183,000 %
		4.1	Terwujudnya organisasi pemuda aktif	4.1.1	Prosentase organisasi pemuda yang aktif	70,550 %	72,550 %	74,550 %	76,550 %	80,550 %
				4.1.2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	10,000 Orang	11,000 Orang	12,000 Orang	15,000 Orang	16,000 Orang
				4.1.3	Prosentase wirasaha muda	81,400 %	83,400 %	85,400 %	87,400 %	89,400 %

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penerima pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah:
 - a) SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - b) SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
 - c) SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan Kabupaten Magetan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan
5. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan bidang Dikpora, RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas

Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBN.

Rekapitulasi dari program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2022 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6 Program, 21 Kegiatan, 77 Sub Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1. Program dan kegiatan tahun 2022, target capaian kinerja dan pagu indikatif

Berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan tahun 2022 beserta target capaian dan pagu indikatif dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2022

RENCANA AWAL RKPD				
KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,05 Angka	478.914.251.209
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	170.000.000
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 laporan	45.000.000
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	125.000.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Keuangan	12 Bulan	476.487.401.209
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	476.477.401.209
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	10.000.000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah	465 lembaga	30.000.000
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	465 lembaga	30.000.000
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	10.500.000
1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	3.000.000
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	7.500.000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	2 Kali	30.000.000
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	10.000.000
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	20.000.000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	296.000.000
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	25.000.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	45.000.000
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 bulan	20.000.000
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	20.000.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	30.000.000
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	6.000.000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	150.000.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.557.350.000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	300.000.000
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12.000.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.245.350.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	333.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	170.000.000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	13.000.000
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	150.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, jumlah kebutuhan pendidikan non formal	98.75, 100, 99.41, 100, 93.45	66.196.440.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	462 Lembaga	37.236.000.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	1 unit	760.000.000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 unit	220.000.000
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	lembaga	-
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2 unit	450.000.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	2 unit	433.000.000
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	lembaga	-
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 paket	270.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7100 siswa	425.000.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	425.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	462 lembaga	560.000.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	33.543.000.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	462 lembaga	150.000.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Lembaga	23.413.840.000
1.01.02.2.02.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	unit	-
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	unit	-
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	lembaga	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 unit	220.000.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1 unit	200.000.000
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	lembaga	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 paket	50.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	6500 siswa	300.000.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	450.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56 lembaga	145.000.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	21.998.840.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56 lembaga	50.000.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	704 Lembaga	3.691.600.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	lembaga	-
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 unit	649.000.000
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	lembaga	-
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	704 lembaga	50.000.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2.500 unit	170.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1149 orang	2.767.600.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 kali	30.000.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	704 lembaga	25.000.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	lembaga	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	13 Lembaga	1.855.000.000
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 unit	15.000.000
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2 bulan	1.500.000.000
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	0	-
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	13 lembaga	200.000.000
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 lembaga	40.000.000
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 kegiatan	85.000.000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 lembaga	15.000.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	lembaga	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,60%	6.650.000.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8 Kegiatan	6.650.000.000
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/	4 kegiatan	6.200.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 kegiatan	450.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	78,62%	515.000.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	3 Kegiatan	340.000.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 kegiatan	40.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2 kegiatan	300.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	3 lembaga	175.000.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3 lembaga	175.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan cabang olahraga	92,86%	3.849.000.000
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	4 unit	1.350.000.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 unit	1.350.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten	10 kali	100.000.000
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 kali	100.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	16 cabor	349.000.000
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	16 cabor	349.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12 Bulan	2.000.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 bulan	2.000.000.000
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	cabor	-
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 Kali	50.000.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 kali	50.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	632.200.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12 Bulan	632.200.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN ANGGARAN
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	45.200.000
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	12 bulan	200.000.000
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	12 bulan	387.000.000
TOTAL				556.756.891.209

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2022 disusun dalam upaya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, serta pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, rencana kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN). Peran perencanaan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sangat penting

Disamping itu, masalah-masalah pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang paling mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia Kabupaten merupakan sumbangan yang berharga dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan baik tingkat propinsi maupun nasional. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah daerah memanfaatkan otonomi daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan, sekaligus merupakan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Magetan.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam rangka tahapan proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022.

54. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 mengacu pada RKPD tahun 2022. Disamping itu, penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini juga didasarkan

pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2018-2023 sampai dengan tahun 2020, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2022 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor Seri E);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

25. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Badan Kepegawaian Daerah tahun sebelumnya;
2. Menetapkan target-target kinerja Badan Kepegawaian Daerah;
3. Menetapkan program / kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dan Sasaran penyusunan dokumen Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, sertasusunan garis besar isi

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja Kunci (IKK)

- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya.
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD.
Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan paramasyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SPG's, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan terdepan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

yang meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- a. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- b. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2022 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BKD dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh BKD.

Pada umumnya program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020 dan telah terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 secara garis besar dapat dilaksanakan dan sebagian memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun ada sebagian yang harus merubah target sesuai perubahan anggaran dan tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Ini disebabkan oleh adanya penyebaran wabah Covid-19 yang berdampak signifikan pada kegiatan sosial dan ekonomi yang tentu saja juga berdampak pada pembatasan pengalokasian anggaran pemerintah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2020
KABUPATEN MAGETAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(ou tcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2018-2023		Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020						Target programdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi TargetRenstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
1.1.1	Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase aparatur yang dinilai	82	%	13	%	78	%	97,5	%	125	%	80	%	79	%	98,75	%
1.1.1.1	Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	735	Orang	75	Orang	150	Orang	150	Orang	100	Orang	160	Orang	160	Orang	100	Orang
1.1.1.2	Penilaian kinerja aparatur	Jumlah dokumen P2KP pejabat	310	dokumen	65	dokumen	62	dokumen	62	dokumen	100	dokumen	62	dokumen	62	dokumen	100	dokumen
1.1.1.3	Penerbitan kartu Istri/Suami,Kartu Pegawai dan Tabungan pensiun	Jumlah dokumen karis/karsu dan taspen yang dikirim	900	Dokumen	160	Dokumen	150	Dokumen	72	Dokumen	48	Dokumen	185	Dokumen	170	Dokumen	91,892	Dokumen
1.1.1.4	Sosialisasi dan penghimpunan peraturan perundang - undangan	Jumlah peserta sosialisasi	975	Orang	273	Orang	195	Orang	265	Orang	135,9	Orang	195	Orang	195	Orang	100	Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun2018-2023		Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020						Target programdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahunberjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi TargetRenstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
1.1.1.5	Penanganan kasus - kasus ASN	Jumlah penyelesaian kasus disiplin dan perceraian	60	Orang	10	Orang	11	Orang	10	Orang	91	Orang	12	Orang	6	Orang	50	Orang
1.1.1.6	Fasilitasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen monev disiplin aparatur yang disusun	10	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	46	dokumen	2	dokumen	4,3478	dokumen
1.1.1.7	Pembinaan Mental SpiritualAparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental spiritual	150	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang		Orang	0	Orang	0	Orang
1.2.1	Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Prosentase aparatur yang mengalami perubahan karier	83,82	%	21	%	81	%	88	%	108,1	%	83,5	%	81	%	97,006	%
1.2.1.1	Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengalami perubahan karier	3650	Pegawai	711	Pegawai	775	Pegawai	706	Pegawai	91,1	Pegawai	800	Pegawai	755	Pegawai	94,375	Pegawai
1.2.1.2	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur	Jumlah aparatur yang naik pangkat	4800	Pegawai	0	Pegawai	1200	Pegawai	1064	Pegawai	88,67	Pegawai	1200	Pegawai	1100	Pegawai	91,667	Pegawai
1.2.1.3	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti UD	400	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	100	Pegawai	100	Pegawai	100	Pegawai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(ou tcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun2018-2023		Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020						Target programdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahunberjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi TargetRenstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
	kepegawaian																	
1.2.3.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	dokumen
1.2.3.2	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS	6	kali	2	kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100	kali
1.2.3.3	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pelaksanaan pengangkatan PNS	5	kali	0	kali	1	kali	1	kali	100	kali	1	kali	1	kali	100	kali
1.2.3.4	Pembangunan/ Pengembangan Sistem nformasi Kepegawaian	Jumlah data PNS yang diupdate dalam SIMPEG	5000	Pegawai	1.072	Pegawai	1000	Pegawai	1000	Pegawai	100	Pegawai	1000	Pegawai	1000	Pegawai	100	Pegawai
1.2.3.5	Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	Jumlah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja	4	kali	0	kali	1	kali	0	kali	0	kali	0	kali	0	kali	0	kali
1.2.4	Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	Persentase penyelesaian dokumen aparatur yang purna tugas	100	%	22	%	100	%	77	%	77	%	100	%	100	%	100	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
1.2.4.1	Fasilitasi Purna Tugas ASN	Jumlah pegawai yang pensiun	2200	Orang	422	Orang	450	Orang	553	Orang	122,9	Orang	450	Orang	450	Orang	100	Orang
1.2.4.2	Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mengikuti pembekalan kewirausahaan	1500	Pegawai	300	Pegawai	300	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	300	Pegawai	300	Pegawai	100	Pegawai
1.2.5	Program Pelayanan Kepangkatan SDM Aparatur	Persentase penyelesaian dokumen kenaikan pangkat aparatur	100	%	17	%	85	%	0	%	0	%	0	%		%	0	%
1.2.5.1	Penataan Administrasi Kepangkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM aparatur yang naik pangkat	1200	Pegawai	1.064	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai
1.2.5.2	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	150	Pegawai	150	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai	0	Pegawai
1.2.6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85,55	%	25	%	85	%	194	%	228	%	85,3	%	85	%	99,648	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1.2.6.1	Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	420	Orang	37	Orang	40	Orang	36	Orang	90	Orang	80	Orang	80	Orang	100	Orang
1.2.6.2	Pelatihan dan Ujian Pengembangan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi	250	Orang	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	40	Orang	40	Orang	100	Orang
1.2.6.3	Pelatihan Kepemimpinan Aparatur	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	65	Orang	0	Orang		Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang
1.2.6.4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	345	Orang	67	Orang	60	Orang	158	Orang	263,3	Orang	40	Orang	40	Orang	100	Orang
1.1.1	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	20	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen	182	dokumen	37	dokumen	37	dokumen	37	dokumen	100	dokumen	37	dokumen	37	dokumen	100	dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun2018-2023		Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020						Target programdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahunberjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi TargetRenstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
		laporan kinerja keuangan																
1.1.1.2	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	85	dokumen	17	dokumen	17	dokumen	17	dokumen	100	dokumen	19	dokumen	19	dokumen	100	dokumen
2.1.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	83	Indeks	16	Indeks	80	Indeks	100	Indeks	125	Indeks	79,8	Indeks	79	Indeks	98,997	Indeks
2.1.2.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan
2.1.2.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan
2.1.2.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	Dokumen
3.1.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	67,6	%	13	%	64	%	100	%	156,3	%	100	%	100	%	100	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(ouctome) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun2018-2023		Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020						Target programdan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahunberjalan			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Volume	Satuan	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi TargetRenstra (%)	
							Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan
3.1.3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan
3.1.3.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	ulan	100	bulan	12	bulan	12	bulan	100	bulan
3.1.3.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	11	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100	Unit	12	Unit	12	Unit	100	Unit
3.1.3.4	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/oprasional	0	Unit	0	Unit		Unit	0	Unit	0	Unit	12	Unit	12	Unit	100	Unit

Seiring dengan mewabahnya covid 19, selain mengakibatkan refofusing, beberapa kegiatan juga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang khususnya mengundang banyak orang untuk wajib penuhi protokol kesehatan sehingga sejumlah anggaran perlu ditambahkan guna penyediaan sarana kesehatan guna mencegah timbulnya klaster covid 19. Dari beberapa point diatas, secara keseluruhan berbagai upaya dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diharapkan. Namun dengan adanya wabah covid 19, yang sangat mempengaruhi terhadap anggaran dan prosedur kegiatan sehingga cukup banyak kegiatan yang harus ditunda dan dirubah pelaksanaannya baik itu dengan mengadaptasi kegiatan namun ada juga yang terpaksa sampai dengan tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap capaian target kegiatan, namun dengan melakukan perubahan target diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019. Dikarenakan hal demikian maka jumlah program dan kegiatan Tahun 2021 berbeda secara signifikan. Adapun rekapitulasi evaluasi rencana kerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Prakiraan Capaian Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan							
								Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	3		KEPEGAWAIAN												
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi					75	%	75	%	100	%
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan				4	Dokumen	4	Dokumen	100	%
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen survey IKM Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan				40	Dokumen	40	Dokumen	100	%
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi				75	%		%		%
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan				14	bulan	14	bulan	100	%

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
														Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan/tribulanan/s emester dan tahunan							19	Dokumen	19	Dokumen	100	%	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi							75	%	75	%	100	%	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor							12	bulan	12	bulan	100	%	
						Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan pelayanan peralatan rumah tangga							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							12	bulan	12	bulan	100	%	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi							12	bulan	12	bulan		%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
								Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
5 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						75	%	75	%	100	%
5 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi						12	bulan	12	bulan	100	%
5 3 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						12	bulan	12	bulan	100	%
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor						12	12 bulan	12	bulan	100	%
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						75	%	100	%	100	%
5 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas						12	bulan	12	bulan	100	%
5 3 1 2.09 0 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor						12	bulan	12	bulan	100	%
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		%										
5 3 2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan data pegawai						100	%	100	%	100	%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan									
								Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)							
	ASN																
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan ASN						1	Dokumen	1	Dokumen	100	%
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN						1	Dokumen	1	Dokumen	100	%
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang diberhentikan						400	Orang	400	Orang	100	%
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi						2	kali	2	kali	100	%
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data PNS yang diupdate dalam Simpeg						1000	pegawai	1000	pegawai	100	%
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase aparatur yang mengalami perubahan karier											%
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mengalami perubahan karier						775	Orang	775	Orang	100	%
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI						100	Orang	100	Orang		%
						Jumlah aparatur yang naik pangkat						1000	Orang	1000	Orang		%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
												Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
																%	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan						100	%		%	%	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas kinerja						1	kali	1	kali	100	%
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian potensi/kompetensi						100	Orang	100	Orang	100	%
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar & bantuan tugas belajar						30	Orang	30	Orang	100	%
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pelatihan kepemimpinan						45	Orang	45	Orang	100	%
5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi						80	Orang	80	Orang	100	%
5	3	2	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian sertifikasi						30	Orang	30	Orang	100	%
5	3	2	2.03	2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah peserta sosialisasi						195	Orang	195	Orang	100	%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program(outcome)/ Indikator kegiatan(Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
												Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Urusan Pemerintahan Umum												
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi						100	%		%		%
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan prajabatan/latsar						2	kali	2	kali	100	%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintah dibidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008, memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Magetan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, penghargaan dan pensiun.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK, IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tabel berikut :

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/IK U/I indikator lain	Target					Realisasi		Proyek si Tahun 2021	Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A.	Urusan Perencanaan											
	Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi		-			-	-		-	-		
	Jumlah yang mengikuti Tugas Belajar		-			-	-		-	-		
	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya		-	81 %	82 %	83 %	83,5 %	84 %	81,11 %	78 %		
	Persentase Penurunan terhadap		-	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	90 %	91%		

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/IKU/I ndikator lain	Target					Realisasi		Proyeksi Tahun 2021	Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN											
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		-	93%	93,5 %	94 %	94,5 %	95 %	93 %	94%		
	Prosentase Peningkatan Produktiitas Pegawai		-	92,5	93	93,5	94	94,5	92,5 %	93 %		
	Prosentase ASN yang SKPnya bernilai baik			80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	90 %	92 %		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi utama Badan Kepegawaian Daerah membantu pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan manajemen ASN Kabupaten Magetan meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan pengkajian, pembinaan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban tanggungjawab, larangan, sanksi dan penghargaan dan pensiun.

Isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur
- Belum tersedianya SKP secara Aplikasi
- Belum Validnya data PNS dalam SIMPEG
- Belum optimalnya pelaksanaan Talent Pool

Peningkatan Kinerja Pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis :

- Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada BKD Kabupaten Magetan khususnya kegiatan diklat fungsional belum bisa optimal karena kurangnya anggaran untuk pengiriman diklat dan tidak adanya laporan dari OPD yang telah mengirimkan Aparatur untuk mengikuti diklat sehingga data ASN yang mengikuti diklat di BKD belum mengkomodir datanya.
 - Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar/ ijin belajar dengan permasalahan PNS yang mengajukan ijin belajar kurang memahami aturan tentang jarak tempuh dan jurusan yang diambil tidak linier dgn jenjang pendidikan sebelumnya / tidak mendukung tupoksi
- b. Upaya yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi SKP, membuat aplikasi yang terintegrasi dengan Kominfo
 - c. Data PNS dalam Simpeg belum valid, Diharap OPD aktif dalam update data dan mengunggah dokumen fisik dalam bentuk scan yang mana scan jelas dan terbaca.
 - d. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur perlu adanya kegiatan Talent Pool namun hal itu belum bisa maksimal dilaksanakan karena kurangnya anggaran untuk pelaksanaan Talent Pool tersebut.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah di jajaran Kabupaten Magetan, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD ada beberapa hal tantangan dan peluang diantaranya :

Tantangan :

1. Kurangnya tingkat pemahaman para PNS terhadap peraturan - peraturan kepegawaian.
2. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur di bidang perencanaan.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD :

1. Penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pada analisa kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian pada PNS.
3. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.
4. Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang ASN
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang.
6. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel, pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing bidang dan kebutuhan sekretariat. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Deskripsi kuantitatif mengenai rancangan awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4.

Review terhadap rancangan Awal RKPD 2022 Kabupaten Magetan

Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	pagu	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	4 Dokumen	17,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	4 Dokumen	17,500,000			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah dokumen survey IKM	1 Dokumen	28,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah dokumen survey IKM	1 Dokumen	28,500,000			
			Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	40 Dokumen				Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	40 Dokumen				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,089,920,343	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,089,920,343
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan	4,069,920,343	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan	4,069,920,343			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan/tribulanan/s emester dan tahunan	19 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan/tribulanan/se mester dan tahunan	19 Dokumen	20,000,000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						394,525,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah						394,525,000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	5,992,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	5,992,000			
6	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Magetan	Jumlah pengadaan	12 bulan	174,500,000	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Magetan	Jumlah pengadaan	12 bulan	174,500,000			

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	pagu	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor			Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor			
			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan				Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan pelayanan peralatan rumah tangga	12 bulan	5,977,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan pelayanan peralatan rumah tangga	12 bulan	5,977,000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	22,956,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	22,956,000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30,000,000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5,100,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5,100,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,276,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,276,200	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	2,477,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	2,477,200	
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	39,999,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	39,999,000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	49,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	49,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104,902,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104,902,000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	99,902,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	99,902,000	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Magetan	Jumlah penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	5,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	pagu	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6,161,880,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6,161,880,000	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					2,320,880,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					2,320,880,000	
17	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Magetan	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Magetan	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	1 Dokumen	30,000,000			
18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN	1 Dokumen	2,000,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN	1 Dokumen	2,000,000,000			
19	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang diberhentikan	400 Orang	70,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang diberhentikan	400 Orang	70,000,000			
20	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi	2 kali	120,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi	2 kali	120,000,000			
21	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Magetan	Jumlah data PNS yang diupdate dalam Simpeg	1000 pegawai	100,880,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Magetan	Jumlah data PNS yang diupdate dalam Simpeg	1000 pegawai	100,880,000			
	Mutasi dan Promosi ASN					1,210,000,000	Mutasi dan Promosi ASN					1,210,000,000	
22	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Magetan	Jumlah ASN yang mengalami perubahan karier	775 Orang	950,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Magetan	Jumlah ASN yang mengalami perubahan karier	775 Orang	950,000,000			
23	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Magetan	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	100 Orang	260,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Magetan	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	100 Orang	260,000,000			
		Kab. Magetan	Jumlah aparatur yang naik pangkat	1000 Orang				Jumlah aparatur yang naik pangkat	1000 Orang				
	Pengembangan Kompetensi ASN					2,445,000,000	Pengembangan Kompetensi ASN					2,445,000,000	
24	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas kinerja	1 kali	300,000,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas kinerja	1 kali	300,000,000			
25	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Magetan	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian potensi/kompetensi	1 kali	305,000,000	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Magetan	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian potensi/kompetensi	100 ORANG	305,000,000			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	pagu	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
26	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar & bantuan tugas belajar	75 Orang	120,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar & bantuan tugas belajar	30 Orang	120,000,000	
27	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Magetan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	120 Orang	1,310,000,000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Magetan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	45 Orang	1,310,000,000	
28	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	40 Orang	200,000,000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	80 Orang	200,000,000	
29	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti ujian sertifikasi	20 Orang	110,000,000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti ujian sertifikasi	30 Orang	110,000,000	
30	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Magetan	Jumlah peserta sosialisasi	195 Orang	100,000,000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Magetan	Jumlah peserta sosialisasi	195 Orang	100,000,000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					186,000,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					186,000,000
31	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Magetan	Jumlah dokumen penilaian kinerja pns	63 Dokumen	70,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Magetan	Jumlah dokumen penilaian kinerja pns	63 Dokumen	70,000,000	
32	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	150 orang	66,000,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	150 orang	66,000,000	
33	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pembinaan disiplin ASN	3 Laporan	50,000,000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Magetan	Jumlah pelaksanaan pembinaan disiplin ASN	3 Laporan	50,000,000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2,700,000,000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2,700,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2,700,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2,700,000,000
Pengembangan Kompetensi Teknis					350,000,000	Pengembangan Kompetensi Teknis					350,000,000
34	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	50 Orang	350,000,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	40 Orang	350,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	pagu	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator	target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2,350,000,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2,350,000,000	
35	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Kab. Magetan	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan prajabatan/latsar	2 kali	2,350,000,000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Kab. Magetan	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan prajabatan/latsar	2 kali	2,350,000,000	
					13,589,503,543					13,589,503,543	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2022 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022 Kabupaten Magetan

Nama SKPD :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan BKD termasuk dalam urusan wajib Program peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk kebutuhan PNS. Sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga - tenaga tertentu yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui bezzeting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan pemerintahan daerah atau mengakomodir kebutuhan - kebutuhan daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja BKD dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis BKD Magetan dalam Program/Kegiatan Prioritas BKD tahun 2022.
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan BKD Magetan tahun 2022.
- c. Menjadi acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada BKD Magetan.
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas Perencanaan dan Program /kegiatan diantara bidang dan Sekretariat pada BKD Magetan.
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran BKD Magetan.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran tahun mendatang tentang cita dan citra atau keadaan masa mendatang yang hendak diwujudkan oleh suatu Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Magetan “ SMART (SEHAT, MAJU, AGAMIS, RAMAH dan Terampil) MANTAB (Mandiri, Lestari dan Bermartabat) ” yang terutamanya BKD masuk pada Misi Ke V (Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil), maka dirumuskan Tujuan dan sasaran BKD Magetan untuk mendukung visi misi dari Kepala Daerah yang didalamnya mengandung Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai di Badan Kepegawaian Daerah. Selain sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD yaitu :

Tujuan : Meningkatnya ASN Yang Berkinerja Baik

Indikator Tujuan : Indeks Profesionalisme ASN

Sasaran 1. : - Meningkatnya produktifitas kinerja ASN

Indikator Sasaran: Prosentase ASN Dengan SKP Bernilai Baik

Sasaran 2. : -. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur.

Indikator Sasaran : Prosentase ASN yang Menduduki Jabatan sesuai dengan kompetensinya.

Sasaran 3. : - Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD:

Indikator Pendukung : Nilai AKIP BKD

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran dan Target Renja Badan Kepegawaian Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan profesionalisme ASN		Indeks Profesionalitas ASN	53
		Meningkatnya produktifitas kinerja ASN	Prosentase ASN dengan SKP bernilai baik	84
		Meningkatnya kompetensiSDM aparatur	Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	83,5

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran dan Target Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Meningkatnya produktifitas kinerja ASN	Prosentase ASN dengan SKP bernilai baik	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja Aparatur	1 kali
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	150 orang
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	36 orang
		Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	1 Dokumen
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN	1 kali
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang diberhentikan	450 Orang
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi	2 kali
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data PNS yang diupdate dalam Simpeg	1000 pegawai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mengalami perubahan karier	775 Orang
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI	100 Orang
					Jumlah aparatur yang naik pangkat	1200 Orang
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas kinerja	1 kali
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian potensi/kompetensi	100 ORANG
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar & bantuan tugas belajar	30 Orang
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	45 Orang
				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek tugas dan fungsi	80 Orang
				Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian sertifikasi	30 Orang
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah peserta sosialisasi	195 Orang
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	40 Orang
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pembang kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagipimpinan daerah dan prajabatan/latsar	2 kali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai evaluasi AKIP BKD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja keuangan	5 Dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen dokumen laporan kinerja dan Keuangan	46 Dokumen
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan/tribulanan /semester dan tahunan	19 Dokumen
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	12 bulan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan pelayanan peralatan rumah tangga	12 bulan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	12 bulan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan visi misi bapak Bupati serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BKD menyusun rancangan rencana kerja tahun 2022 dan menguraikan dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 35 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.264.856.198,- (Sembilan Milyard Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sempilan Puluh Delapan Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Magetan dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunkantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN

- Sub Kegiatan :
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN

- Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat

Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan assesment center
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional

- Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN

3. Program **Pengembangan** Sumber daya Manusia

Kegiatan : Pengemabngan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara UrusanPemerintah Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan,pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2020;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD Tahun 2021;
- c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2021;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- f. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi selama tahun 2020 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2022, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan BKD pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 03	KEPEGAWAIAN													
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota	80 skor	5 Laporan	51 Laporan	17,500,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	20,000,000
5 03 01 2.01 02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota	80 skor	46 Laporan	51 Laporan	13,500,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	30,000,000
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran dan tahunan	Semua Kab/Kota	80 skor	14 bulan	14 bulan	2,455,652,998			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	4,382,469,953
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan /semester dan tahunan	Jumlah Penyediaan Gajidan tunjangan dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran dan tahunan	Semua Kab/Kota	80 skor	19 Dokumen	14 bulan	13,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	25,000,000
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah penyediaan komponen listrik,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,peralatan kantor,peralatan rumah tangga,bahan	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	5,992,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	6,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi										
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	174,500,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	109,500,000
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	5,977,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	6,000,000
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	22,956,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	24,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				koordinasi dan konsultasi										
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	30,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	32,000,000
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	5,100,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	5,500,000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah penyediaan komponen listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan perundangan, rapat koordinasi dan konsultasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	100,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	150,000,000
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,276,200					109,477,200
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Indeks Kepuasan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	2,477,200			Indeks Kepuasan	80 skor	2,477,200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Daya Air dan Listrik	Masyarakat		sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum antor								Masyarakat		
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum antor	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	39,999,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	47,000,000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum antor	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	49,800,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	60,000,000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,902,000					130,000,000
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	99,902,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	125,000,000
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Semua Kab/Kota	80 skor	12 bulan	12 bulan	5,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	5,000,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								4,671,000,000					7,545,000,000
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								2,200,000,000					3,205,000,000
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah Dokumen kebutuhan ASN	Prosetase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota	100 %	1 Dokumen	100 persen	30,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN	Prosetase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan	Semua Kab/Kota	100 %	1 Kali	100 persen	1,900,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	2,500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Informasi Kepegawaian ASN										
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah Pegawai yang diberhentikan	Prosetase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota	100 %	450 Pegawai	100 persen	70,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pelaksanaan fasilitasi profesi ASN	Prosetase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota	100 %	2 kali	100 persen	120,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	425,000,000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah data yang diupdate dalam Simpeg	Prosetase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota	100 %	1000 Data	100 persen	80,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	130,000,000
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								630,000,000					1,260,000,000
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah ASN yang mengalami mutasi	Prosentase ASN yang mengalami Perubahan Karier	Semua Kab/Kota	100 %	825 Pegawai	100 %	455,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	1,000,000,000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah aparatur yang mengikuti UD & PI dan Jumlah aparatur yang naik pangkat	Prosentase ASN yang mengalami Perubahan Karier	Semua Kab/Kota	100 %	1300 Pegawai	100 %	175,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	260,000,000
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								1,675,000,000					2,875,000,000
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja ASN	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	1 kali	100 %	100,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	325,000,000
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pelaksanaan penilaian potensi/kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	1 kali	100 %	200,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	320,000,000
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar & bantuan tugas belajar	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	35 Pegawai	100 %	100,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	250,000,000
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pejabat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	29 Pegawai	100 %	1,000,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	1,500,000,000
5 03 02 2.03 08	Penyusunan	Persentase	Jumlah PNS yang	Prosentase	Semua	100 %	40	100 %	125,000,000			Persentase	100 %	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	elayanan Kepegawaian (%)	mengikuti bimtek tugas dan fungsional	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Kab/Kota		Pegawai					elayanan Kepegawaian (%)		
5 03 02 2.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah PNS yang mengikuti ujian sertifikasi	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	15 Orang	100 %	100,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	130,000,000
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah peserta sosialisasi	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota	100 %	110 Pegawai	100 %	50,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	100,000,000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								166,000,000					205,000,000
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja aparatur	Prosentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota	100 %	1 Kali	100 %	70,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	Prosentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota	100 %	150 pegawai	100 %	66,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	75,000,000
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan disiplin ASN	Prosentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota	100 %	30 Pegawai	100 %	30,000,000			Persentase pelayanan Kepegawaian (%)	100 %	55,000,000
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,552,500,000					2,900,000,000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,552,500,000					2,900,000,000
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								200,000,000					400,000,000
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	Prosentase Pelaksanaan pengembangan Sumber daya Manusia	Semua Kab/Kota	100 %	20 Pegawai	100 %	200,000,000			Prosentase Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	400,000,000
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,352,500,000					2,500,000,000
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Prosentase Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pelaksanaan latsar/prajab, pengembangan kompetensi bagi	Prosentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber daya Manusia	Semua Kab/Kota	100 %	2 kali	100 %	1,352,500,000			Prosentase Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	2,500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		pimpinan daerah											
TOTAL									9,264,856,198				15,474,947,153	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis satuan kerja perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja BKD Magetan selama tahun 2022 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 – 2023 memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang-bidang substantif pemerintah.
2. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama aparatur dalam penyiapan sumberdaya aparatur
3. Memantapkan pembinaan karir aparatur pemerintah.
4. Memantapkan sistem informasi kepegawaian sebagai sumber informasi kebijaksanaan kepegawaian.
5. Memantapkan sistem administrasi kepegawaian guna meningkatkan pelayanan kepegawaian dan kesejahteraan aparatur.

Namun demikian kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi bapak Bupati tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta OPD - OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Rencana Kerja tahun ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Seluruh unsur dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, akan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

